

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERKELAHIAN AKIBAT
MINUMANKERAS DI KECAMATAN BATANG
KABUPATEN JENEPONTO
DARI TAHUN 2013-2016**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh

SRI RAHAYU

NIM. 10500113092

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu
NIM : 10500113092
Tempat/Tgl. Lahir : Palu, 12 April 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum/Strata Satu (S1)
Alamat : Antang
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Akibat Minuman
Keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dari tahun 2013-
2016

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa iya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Mei 2017

Penyusun,

SRI RAHAYU

NIM: 10500113092

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah serta kemudahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya Shalawat serta Salam atas junjungan Nabiallah Muhammad SAW yang telah menggulung tikar kejahiliyaan kemudian membenteng sajadah-sajadah keislaman. Sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini.

Karya Tulis Ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Akibat Minuman keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2013-2016”**. Merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan atau masih jauh dari kata sempurna karena penulis masih memiliki keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semu pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pertama penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Raja dan Ibunda Hernawati yang tidak pernah lelah membesarkan serta mendidik penulis hingga sampai saat ini, dan ucapan terimah kasih yang sebanyak-banyaknya untuk suamiku tercinta Baktiar, S.Pd yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya untuk saudara penulis Fartiwai dan Muh. Ichsan terima kasih telah menjadi saudara terbaik selama ini. terima kasih untuk kakak sepupu penulis Sudirman dan Hasni yang telah memberikan dukungan, bantuan moril dan materil selama ini. Seta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan doa restu sehingga penulis sampai pada saat ini.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Musaffir., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dan segenap jajarannya Wakil Rektor Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dan segenap jajarannya.
3. Ibu Istiqamah, SH.,MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, sekaligus sebagai Penasehat Akademik penulis.
4. Bapak Dr. H. Halim Talli, S.Ag selaku pembimbing I, dan Ibu St. Nurjannah, SH.,MH selaku pembimbing II.
5. Bapak Dr. Jumadi, M.H. Selaku Penguji I dan Dr. Marilang, M.Hum. selaku penguji II.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum terima kasih atas ilmu yang telah disalurkan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
7. Kepada seluruh staf perpustakaan terima kasih telah melayani dengan baik dan menyediakan referensi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muh. Akrif, S.Sos, selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Batang yang telah membantu memberikan informasi dan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada guru dan teman SDN III Samataring, guru dan teman SMPN 2 Kelara, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Pimpinan Pondok Pesantren An-Nuriyah Bapak K.H. M. Yahya Ahmad Lc, yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan wejangan untuk penulis sampai saat ini.
11. Ustadz dan Ustadzah MTs dan MAS Pondok Pesantren An-Nuriyah yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
12. Kepada saudara dan saudari penulis Ikatan Alumni (IKA) Pondok Pesantren An-Nuriyah yang telah mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis dan telah menjadi salah satu wadah berbagi pengalaman selama ini. Tetaplah jaya IKA Pondok Pesantren An-Nuriyah, jayalah Almamater Pondok Pesantren An-Nuriyah, Bertekad Maju Untuk Tetap Unggul (BERMUTU).
13. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2013
14. Keluarga besar KKN Kec. Rumbia Kab. Jeneeponto pada Umumnya Desa Bontomanai pada khususnya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, doa, sumbangan pemikiran, bantuan materil dan non materil, penulis ucapkan terima kasih.

Demikianlah kata pengantar penulis, mohon maaf atas segala tulisan yang tidak berkenan dalam skripsi ini. Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala amal perbuatan dan budi baik kita semua. Amin.

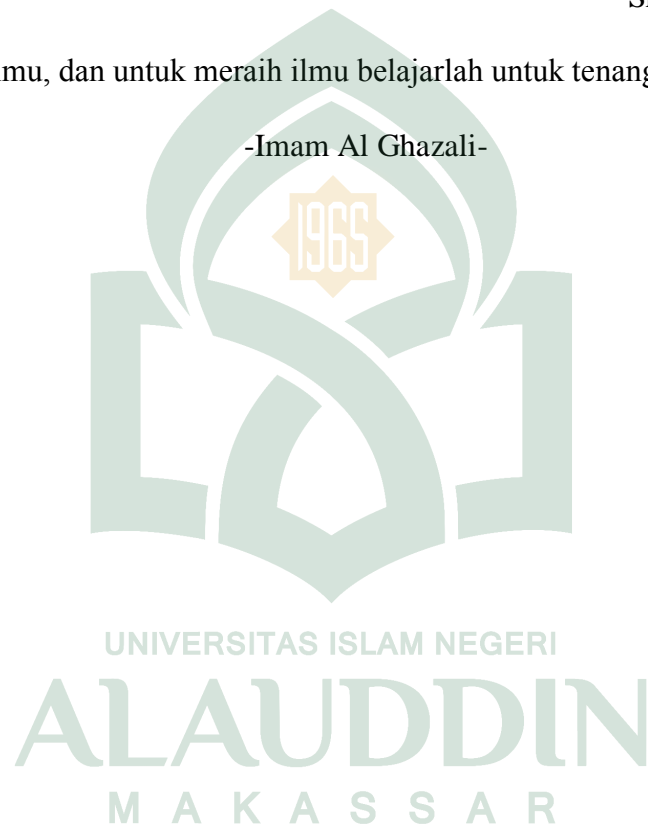
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 19 Mei 2017

Sri Rahayu

“Railah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlal untuk tenang dan sabar”

-Imam Al Ghazali-



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-5
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Definisi Operasional	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	6-32
A. Tinjauan Kriminologi.....	6
1. Pengertian Kriminologi.....	6
2. Teori-teori Sebab Melakukan kejahatan	13
3. Pembagian Kriminologi	18
4. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi	20
B. Pengertian Perkelahian Pengertian Perkelahian.....	21
C. Pengertian dan Kandungan Minuman Keras	25
D. Ketentuan Hukum tentang Minuman Keras dan Dampak Minuman Keras.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34-35
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37-59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37

B. Gambar Peta.....	46
C. Perkelahian Akibat Minuman Keras	49
D. Tindakan sehingga Terjadi Perkelahian Akibat Minuman Keras.....	56
E. Hambatan Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Perkelahian Akibat Minuman Keras	58
1. Kurangnya Kerjasama antara Aparat Kepolisian dan Masyarakat Setempat	58
2. Adanya Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Aparat Kepolisian) dalam Menangani Masalah Tersebut.....	59
3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana.....	58
F. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Masalah Tersebut	60
BAB V PENEUTUP.....	65-66
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Daftar nama personil yang bertugas di wilayah hukum polsek batang
2. Tabel 2: Data jumlah kasus perkelahian akibat minuman keras
3. Tabel 3: Penanganan Perkelahian akibat minuman keras
4. Tabel 4: Data kasus perkelahian akibat minuman keras yang tidak dilaporkan ke pihak kepolisian
5. Tabel 5: Data akibat yang ditimbulkan dari perkelahian akibat minuman keras
6. Tabel 6: Data tingkat pendidikan pelaku perkelahian akibat minuman keras



ABSTRAK

Nama : Sri rahayu
NIM : 1050011309
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2013-2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang menyebabkan perkelahian akibat minuman keras, serta untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menangani perkelahian akibat minuman keras yang terjadi di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Fokus dalam penelitian ini adalah tindakan yang menyebabkan perkelahian akibat minuman keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pikak Kepolisian Kecamatan Batang, Toko Agama, Toko Masyarakat, dan Masyarakat. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah tindakan yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian akibat minuman keras yaitu adu mulut/cerita kejagoan, unjuk kebolehan, emosi yang tidak stabil. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya gesekan antar kedua pihak pelaku. Adapun upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan dua cara preventif dan refresif.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih profesional lagi dalam menangani kasus ini, artinya aparat penegak hukum bisa lebih aktif lagi dalam mencegah agar kasus seperti ini tidak terus terulang, dan sebaiknya memiliki kerjasama yang baik dengan masyarakat setempat agar dalam menangani kasus ini dapat lebih ringan serta dapat terminimalisir. 2. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus ini, sehingga kasus ini dapat diproses secara profesional dan Perlunya ditingkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab pada setiap anggota kepolisian agar tidak lalai dalam menanggulangi kasus perkelahian akibat minuman keras. 3. Selain itu aparat kepolisian diharapkan berkompeten dalam menangani kasus ini agar lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dalam memberikan upaya-upaya penyuluhan di daerah-daerah yang dianggap rawan. Bahkan pemerintah juga diharapkan kerja sama yang sangat diharapkan agar dapat meminimalisir kejadian seperti tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang tidak dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman ini ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dimana mereka hidup dengan lingkungan yang memiliki watak yang keras sebagaimana terlihat dengan keseharian mereka. Dimana keadaan lingkungan juga yang panas sehingga sedikit saja adanya gesekan antarmasyarakat maka akan timbul perselisihan hingga terjadi perkelahian bahkan pembunuhan. Bukan hanya itu, budaya masyarakat juga menganggap remeh ketika ada sekelompok masyarakat yang melakukan pesta minuman keras di sekitar mereka, padahal mereka tahu dan sadar hal demikian akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Dari dampak minuman keras itu timbullah perkelahian yang sering terjadi antarmasyarakat dan tidak jarang menimbulkan korban. Hampir disetiap pesta hajatan masyarakat, minuman keras tidak pernah absen melengkapi suasana pesta tersebut.

Walaupun kita ketahui bahwa dalam agama islam minuman keras sangat dilarang karena memiliki multi dampak, seperti pemerkosaan, pencurian, perkelahian bahkan sampai dengan pembunuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

¹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 3.

Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung.²

Dalam ayat tersebut sangat jelas mengenai pelarangan minuman keras karena merupakan perbuatan yang keji lagi perbuatan setan. Salah satu contoh dampak dari minuman keras yaitu perkelahian yang terjadi di Desa Pamissorang Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Dalam perkelahian itu terjadi penikaman dan pemukulan menggunakan botol minuman keras.

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pada pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, di mana, bilamana, dan kondisi yang bagaimana. Akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulant. Sedangkan stimulant itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya minuman keras merupakan racun protoplasmic yang mempunyai efek depresi pada system syaraf. Akibatnya seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologi maupun social namun perlu dicatat bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan proses tersendiri, yang memakan waktu.³

Minuman keras menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik, karena mengandung banyak dampak negatif. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Dalam masyarakat yang biasa terjadi adalah ketika minuman keras ini telah menguasai mereka maka tak jarang peminumnya melakukan perkelahian baik itu

² Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta: Az-ziyadah), h.123

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 418.

perorangan maupun antarkelompok. Padahal dalam islam juga melarang kita saling menzalimi antar sesama manusia.

Islam itu mengandung ajaran persaudaraan, persatuan, kekerabatan, kebersamaan agar tercipta kedamaian dalam masyarakat. Maka Maha Besarlah Allah SWT yang telah memperingati kita semua melalui firman-Nya agar senantiasa menjaga dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri serta orang lain.

Setelah membahas larangan perkelahian yang ditetapkan Al-Qur'an selanjutnya dilihat aturan hukum positif yang mengatur hal demikian. Yaitu terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 358 "Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, "Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati".⁴

Akan tetapi semua aturan yang terdapat di atas baik itu aturan dari Allah SWT maupun dari manusia itu sendiri tetap saja marak terjadi perkelahian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Maka dari itu penulis ingin mengamati lebih dalam apa faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadi hal demikian yang hampir tiap tahun Perkelahian Akibat Minuman Keras sulit untuk dihindari.

B. Rumusan masalah

Melihat latar belakang di atas maka penulis menemukan rumusan pokok masalah, yaitu yaitu bagaimana tinjauan kriminologi terhadap perkelahian akibat minuman keras di kecamatan batang kabupaten jeneponto dari tahun 2013-2016. Guna membatasi cakupan pembahasan maka dirumuskan submasalah sebagai berikut:

⁴ R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHP*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 219-220.

1. Bagaimana pengaruh minuman keras terhadap perkelahian di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui tindakan yang menyebabkan Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani masalah tersebut.

2. Manfaat penelitian adalah:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hokum terutama dalam ilmu hukum pidana.
 - 2) Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti oleh penulis.
- b. Manfaat praktis
 - 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat, praktisi hokum dan instansi terkait mengenai Perkelahian Akibat Minuman Keras. Serta dengan dibuatnya tulisan ini dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian kabupaten jeneponto dalam menanggulangi masalah tersebut.
 - 2) Melalui tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata S1 dan menyandang gelar Sarjana Hukum.

D. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan, pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yang berkaitan dengan judul dan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan serta cara-cara menanggulangi kejahatan tersebut.
2. Perkelahian adalah dapat dilakukan dengan diantara sekelompok orang yang mana terdapat kesalahpahaman di dalamnya atau ada seseorang yang memulai sehingga terjadi perkelahian tersebut.
3. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan yang mengandung bahan psikoaktif dan mengkomsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran dan sebagainya.

Demikianlah definisi operasional dalam pendahuluan judul di atas.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (social science), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampilkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan dewasa ini bukanlah hal yang asing, karena sejarah telah mengungkapkan bahwa kejahatan ada sejak awal manusia diciptakan di muka bumi ini. Apalagi di jaman dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai pesat yang memberikan peluang seseorang dengan mudahnya melakukan berbagai macam bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws);
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws); dan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).⁵

⁵ A.S. Alam. Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), h.2.

Secara etimologi kriminologi berasal dari kata *logos*=pengetahuan, *crime*=kejahatan; Nama kriminologi berasal dari ahli anthropologi Perancis P. Tiplard (1830-1911); Ilmu pengetahuan yang bertujuan gejala kejahatan seluas-luasnya (Mr. W.A. Bonger); Pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial (Edwin H. Sutherland).⁶

Ensiklopedia Indonesia-Yayasan Kanisius, Yogyakarta. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dengan perhatian khusus pada faktor-faktor kepribadian dan keadaan sosial yang dapat menimbulkan kejahatan atau menghindarkan kejahatan.⁷

Berbicara mengenai definisi kriminologi belum terdapat keseragaman/kesepakatan dari para pakar kriminologi, berhubung mereka memberikan definisi yang berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda pula. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa definisi kriminologi dari berbagai pendapat sarjana dan pakar/ahli kriminologi.

Kanter dan Sianturi memberikan definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.⁸

Selanjutnya W.A Bonger, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu

⁶ J.C.T. Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 86.

⁷ A. Gumilang. *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. (Bandung: Angkasa, 1991), h. 3.

⁸ Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 32.

pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki kriminologi teoritis disusun kriminologi terapan.⁹

Andi Zainal Abidin, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya.¹⁰

Demikian juga dengan, Paul Moeliono, bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.¹¹

Sutherland dan Cressey, menyatakan bahwa kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses perbuatan perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Obyek dari kriminologi adalah proses-proses perbuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.¹²

Lebih lanjut Vrij, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat, pertama-tama menangani apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya.¹³

George C.Vold, menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap artinya kriminologi selalu menunjukan pada perbuatan manusia dan

⁹ R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. (Bogor: Politea, 1985), h. 1

¹⁰ Andi Zaenal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Grafika, 1981), h. 42.

¹¹ Abussalam. *Kriminologi*. (Jakarta: Restu Agung, 2007), h. 5.

¹² Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, h. 35.

¹³ Sahetapy dan Mardjono Reksodiptro. *Paradoks Dalam Kriminologi*. (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 8.

juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa buruk, yang semuanya itu ada dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.¹⁴

Menurut Soejono D, pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.¹⁵

Rusli Effendy, menyatakan bahwa disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.¹⁶

Menurut Moelijatn, menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

¹⁴ Abussalam. *Kriminologi*, h. 5.

¹⁵ R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, h. 3.

¹⁶ Rusli Efendy. *Ruang Lingkup Kriminologi*. (Bandung: Alumni, 1983), h. 10.

¹⁷ Moelijatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 6.

Barda Nawawi Arief, bahwa aliran modern yang di organisasikan oleh Von Lis menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama-sama menangani hasil penelitian kebijakan kriminal, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditunjuk untuk melindungi warga negara yang baik dari kejahatan.¹⁸

Lebih terperinci lagi, definisi dari Martin L, Haskell dan Lewis Yablonski, menyatakan bahwa kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa tentang:

- a. Sifat dan luas kejahatan
- b. Sebab-sebab kejahatan
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
- d. Ciri-ciri penjahat
- e. Pembinaan penjahat
- f. Pola-pola kriminalitas, dan
- g. Akibat kejahatan atas perubahan sosial¹⁹

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sikap tindak kriminal. Sehubungan itu beliau menjelaskan pula bahwa Kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Semarang: PT. Citra Aditiya Bakti, 1991), h. 10.

¹⁹ Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 10.

- b. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta sosial penjahat dan hubungan antara kriminalitas dengan tingka laku abnormal lainnya.
- c. Karakteristik korban-korban kejahatan.
- d. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.
- e. Prosedur sistem peradilan pidana.
- f. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana.
- g. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal.
- h. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan.
- i. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat.
- j. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta. sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.²⁰

Sehubungan. dengan pengertian tersebut maka tepatlah apa yang kemukakan oleh Rusli Effendi, bahwa kriminologi itu meliputi:

- a. Etiologi Kriminal adalah cabang ilmu kriminologi yang secara. khusus mempelajari sebab-sebab atau latar belakang, penjelasan dan korelasi kejahatan, cabang ilmu ini lazimnya mencakup : biologi kriminal, psikologi kriminal, psikiatri kriminal, maupun sosiologi hukum pidana.
- b. Fenomenologi kriminal adalah merupakan cabang ilmu kriminologi dan mempelajari tentang bagaimana perkembangan kejahatan dan gejalanya.
- c. Victimologi kriminal adalah cabang kriminologi yang secara khusus mempelajari tentang akibat yang timbul dari suatu kejahatan (korban kejahatan).
- d. Penologi adalah ilmu tentang penghukuman dalam arti yang sempit, namun ilmu ini adalah merupakan salah satu cabang kriminologi yang membahas konstruksi undang-undang hukum pidana, penghukuman dan administrasi sanksi pidana.²¹

²⁰ Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 27.

²¹ Rusli Efendy. *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 11.

Apabila melihat beberapa aspek tersebut, yang menjadi cakupan pembahasan kriminologi nampak sangat luas, maka adalah logis bila. untuk praktisnya kriminologi itu terbagi-bagi. Sehubungan dengan itu, Rusli Effendi, menyebutkan bahwa di negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, kriminologi itu dibagi menjadi tiga. bagian yaitu :

- a. Criminal Biologi ialah yang menyelidiki diri orang itu sendiri, akan sebab dari perbuatannya baik jasmani maupun rohani.
- b. Criminal Sociology adalah ilmu pengetahuan yang mencoba mencari sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berdomisili (Milleau).
- c. Criminal Policy adalah tindakan-tindakan apa yang dijalankan agar supaya penjahat itu menjadi lebih baik atau supaya orang tidak turut melakukan perbuatan itu.²²

Edwin H. Sutherland, dalam bukunya yang berjudul "*Principle of Criminology*" berpendapat bahwa kriminologi juga dapat dipandang sebagai ilmu tentang kejahatan dari segi gejala sosial yang relatif menyeluruh yang menghubungkan pembuatan undang-undang, pelanggaran dan sanksi dari pelanggaran tersebut dimana akan lebih mudah untuk menafsirkan kejahatan, penjahat, sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya secara tepat.²³

Berdasarkan pengertian kriminologi di atas, objek kajian kriminologi lebih menekankan pada kejahatan yang seluas-luasnya yaitu mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha pencegahan dan penanggulangan serta perlakuan terhadap penjahat. Sedangkan subjek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu vkelompok masyarakat yang majemuk dan merupakan kelompok masyarakat sosial yang memiliki gejala-gejala sosial sebagai suatu sistem termasuk di dalamnya gejala kejahatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

²² Rusli Efendy. *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 11.

²³ R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor: Politea, 1994), h. 1.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri melainkan terdiri dari beberapa ilmu-ilmu lainnya.

2. Teori-Teori Sebab Melakukan kejahatan

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu:

- a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.
- b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi.
- c. Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya

Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman, membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut :

- a. Zaman kuno

Pada masa, ini dikenal pendapat Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) yang pada dasarnya menyatakan makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan akan kesusilaan demikian pula sebaliknya kerniskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia yang menderita, kerniskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

- b. Zaman abad pertengahan

Thomas Von Aquino (1226-1274 M) menyatakan bahwa orang kaya yang hidup *foya-foya* bila miskin mudah menjadi pencuri. Permulaan zaman baru dan masa sesudah revolusi Prancis banyak dikemukakan dan sebab-sebab sosial lainnya juga masa kini dikenal dengan masa, pertengahan hukuman yang terlalu bengis dan masa itu, sehingga tampil tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria dan lain-lain. Masa sesudah revolusi

Prancis sampai tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi dan psikiatri.²⁴

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir.

Teori ini lebih tegas dituliskan oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita dalam awal teorinya mengusulkan beberapa pendapat yakni sebagai berikut :

- a. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri
- b. Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.
- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.
- d. Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- e. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu".²⁵

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.²⁶

²⁴Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 57.

²⁵ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, h. 53-54.

²⁶ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, h. 62.

Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya "*Increasing demand for prestige articles for conspicuous consumption*"²⁷.

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.²⁸

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger dalam "*in leiding tot the criminologie*" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁹

Yang menjadi objek kriminologi adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, maka suatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana

²⁷ Sahetapy dan Mardjono Reksodiptro. *Paradoks Dalam Kriminologi*, h. 94.

²⁸ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, h. 54.

²⁹ R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, h. 28.

lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai - nilai yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai - nilai dan skala sosial.

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang - undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang - undang hukum pidana.

b. Pelaku.

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi

pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan - keinginan dan harapan - harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian - kajian kriminologi.³⁰

Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan).³¹ Konsep kejahatan dan siap yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (restorative justice).

Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

Berdasarkan etiologi kriminal, tindak kejahatan dilihat dari beberapa perspektif yaitu sosiologis, biologis dan psikologis. Dipandang dari sudut formil (menurut hukum), kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Hukum pidana semacam itu tidak bertujuan melindungi masyarakat, tetapi memperkuat alasan untuk menentang perbuatan sewenang-wenang dari penguasa. Lebih jauh lagi kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, bahkan di negara modern hampir tiap perbuatan yang dicap sebagai

³⁰ Rusli Efendy. *Ruang Lingkup Kriminologi*, h. 3.

³¹ Wahyu Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2012), h. 97.

kejahatan oleh hampir semua penduduknya dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.³²

Penyebab terjadinya kejahatan telah menjadi subjek yang cukup banyak mengundang spekulasi, teoritis, penelitian dan perdebatan di antara para ahli maupun masyarakat umum. Salah satu pendekatan yang menjelaskan sebab kejahatan tersebut, misalnya ada teori yang mengasumsikan kejahatan adalah bagian dari manusia alamiah, keberadaan manusia tidak terlepas dari sifat iblis.³³

Kejahatan dari seorang manusia normal adalah akibat kebersamaan dari bakat dan lingkungan, dimana kali ini yang satu, kemudian faktor lain lagi yang berpengaruh, dan dimana kedua faktor tersebut dapat saling mempengaruhi.³⁴

3. Pembagian Kriminologi

Adapun pembagian kriminologi yaitu kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar antara lain:

a. Kriminologi Teoritis.

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis.

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.
- 2) Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

³² W.A. Bonger. *Pengantar tentang Kriminologi*. (Jakarta: PT. Pembangunan. 1982), h. 19-20.

³³ Susanto. *Kriminologi*. (Yogyakarta: Genta Publishing. 2011), h. v

³⁴ J.E. Sahetapy. *Kriminologi Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1992), h. 124-126.

- 3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- 4) Psikologi dan NeuroPhatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila, misalnya; mempelajari penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi praktis.

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebut bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah :

- 1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya: meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olah raga dan lainya.
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat dalam melakukan kejahatannya.
- 3) Kriminalistik (police scientific), yaitu ilmu pengetahuan tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.³⁵

³⁵ A.S. Alam. Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), h.4.

4. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi

Yang dimaksud aliran pemikiran disini adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat/menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu :

a. Kriminologi Klasik

Dalam pemikiran klasik pada umumnya menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendaknya. Ini berarti manusia mengontrol nasibnya sendiri baik sebagai individu maupun masyarakat.

b. Kriminologi Positivis.

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis dan kultural. Aliran ini dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri pelaku itu sendiri daripada pelaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

c. Kriminologi kritis

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku ini bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses- proses

yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.³⁶

B. Pengertian Perkelahian

konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena didalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka mencapai tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.³⁷

Perkelahian dapat dilakukan dengan diantara sekelompok orang yang mana terdapat kesalahpahaman di dalamnya atau ada seseorang yang memulai sehingga terjadi perkelahian tersebut. Perencanaan perkelahian kelompok yang menyebabkan orang lain atau pihak lawan menderita luka parah dapat dikenakan dengan pasal-pasal mengenai penganiayaan misalnya pasal 351, 353 dan pasal 355 KUHP yang berbunyi:

a. Pasal 351 KUHP

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

³⁶ Santoso.Topo. dan E. A Zulfa. *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001), h.3

³⁷ A.F Saifuddin. *Konflik dan Integrasi*. (Jakarta: Rajawali,1986), h.14.

- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³⁸

b. Pasal 353 KUHP

- 1) Penganiayaan yang direncanakan dahulu, dipidana dengan penjara selama-lamanya empat tahun;
- 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- 3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.³⁹

c. Pasal 355 KUHP

- 1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.⁴⁰

Telah disadari bahwa kejahatan dari segi apapun tidak boleh dibiarkan merajalela dalam pergaulan hidup, oleh karena itu berbicara mengenai kejahatan maka harus dibedakan mengenai kejahatan dalam arti yuridis (Perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang, dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.⁴¹

Sebab-sebab kejahatan yaitu:

³⁸ R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHPA*, h. 214.

³⁹ R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHPA*, h. 217.

⁴⁰ R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHPA*, h. 218.

⁴¹ Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010), h. 86

a. Faktor Pembawaan

Seseorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah maupun karena kegemaran atau hobi.

Kejahatan karena pembawaan ini timbul sejak anak itu dilahirkan seperti, keturunan/atau anak-anak berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan kepada anaknya. Sebab, buah jatuh tak jauh dari pohonnya: *Apple valt niet ver vvan de boom*.

Selain itu pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula bahwa ketika seseorang yang masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan berkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perebutan permainan.

Akan tetapi ketika seseorang menjadi akilbalig (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya menjurus ke kejahatan tercela. Misalnya perbuatan seks seperti perzinahan, pemerkosaan, dan seterusnya

Antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan di bidang ekonomi seperti pencurian, perampokan, berkelahian fisik akibat perebutan pacar dan seterusnya.

Sedangkan umur 30 sampai 50 tahun orang telah memegang posisi kehidupan yang mantap. Jadi, mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi kekuasaan dengan jalan memberikan kesempatan kepada kelompok atau anggota keluarganya untuk menempati posisi-posisi kunci dalam bidang pekerjaannya.

Bila seseorang telah menginjak usia diatas 50 tahun, maka kejahatan yang dilakukan pada umumnya adalah penghinaan terhadap orang lain melalui tulisan-tulisan serta karikatur yang dimuat di media massa seperti surat kabar maupun majalah.

b. Faktor Lingkungan

Socrates mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebijakan tidak nyata baginya.

Dari kata-kata Socrates ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang harmonis merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat, maupun Negara.

Dalam rangka itulah, maka Tap IV/MPR/78 telah memberikan ketegasan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dalam Tap II/MPR/78 tentang P4, MPR secara implisit ingin menyiapkan suatu lingkungan bangsa yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Dengan persiapan yang baik, maka diharapkan adanya suatu ketertiban dan keamanan yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga menjadi masyarakat pancasilais. Dengan demikian, perbaikan factor lingkungan seperti peningkatan hasil pertanian, transmigrasi perkoperasian, letak perkampungan atau perkotaan yang jauh dari daerah-daerah kejahatan ikut pula menentukan tinggi rendahnya grafik kejahatan.

c. Pendapat Sarjana

- 1) L. Lambosoro-Itali. Tipe penjahat ditentukan oleh perwujudan bentuk tulang terutama tengkoraknya disebut Teori Atavisme-corak kriminal.
- 2) U.S. Wiliam Healy-hakim di Inggris. Sebab-sebab kejahatan merupakan berbagai faktor yang saling mengait seperti kesehatan, kepribadian, keadaan rumah tangga yang dituangkan dalam keputusan hakim.
- 3) Edwin H. Sutherland-Sarjana Amerika-1939. Sebab kejahatn adalah pergaulan perbedaan kepribadian manusia atau pergaulan yang berbeda-beda.

- 4) Edwin M. Lamer. Sebab kejahatanna sering dihungkan dengan pelanggaran dengan minum alkohol yang kronis atau penyakit jiwa.⁴²

C. Pengertian dan Kandungan Minuman Keras

Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-bahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁴³ Dengan demikian, kata itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu, ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya. Kata khamr boleh jadi meliputi pula setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama.⁴⁴ Secara garis besar khamr adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁴⁵

Dalil Imam Abu Hanifah adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menuunjuk pohon kurma dan anggur lalu berkata "khamr berasal dari dua pohon ini, diharamkannya khamr karena bendanya dan setiap minuman yang memabukkan.⁴⁶ Dengan demikian Imam Abu Hanifah membedakan antara minuman keras dan minuman yang memabukkan. Menurutnya meminum khamr (minuman keras) itu haram, baik sedikit maupun banyak. Minuman selain khamr yang terbuat dari materi lainnya disebut sebagai minuman yang memabukkan (muskir). Orang yang mabuk karena minuman tersebut tidak dihukum karena meminumnya seperti halnya minuman keras, tetapi karena mabuknya. Menurutnya mabuk disini bukan haram karena mabuknya,

⁴² A. Gumilang. *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. (Bandung: Angkasa. 1991), h. 5-7

⁴³ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Sinar Grafika. 2007), h. 78

⁴⁴ A. Rahman I. *Hudud dan Kewarisan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996), h. 84

⁴⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 9*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), h. 46

⁴⁶ Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid V). (pen.) Ali Yafie. et al. Bogor. Kharisma Ilmu. 2008), h. 61-62

melainkan karena kadar paling akhir yang mengakibatkannya mabuk. Jadi, jika seseorang meminum tiga gelas minuman dan tidak mabuk lalu minum gelas keempat dan mabuk, yang haram adalah gelas keempat tersebut.⁴⁷

Ada beberapa nama yang diberikan untuk jenis minuman keras (khamr):

- a. Khamr, perasan anggur yang telah menjadi minuman keras
- b. Sakar, rendaman kurma matang yang belum dimasak
- c. Bata'', rendaman madu
- d. Ji''ah, rendaman sya''ir
- e. Mazar, yang dibuat dari jagung
- f. Fadlieh, yang dibuat dari perasan putik kurma tanpa dimasak
- g. Chiltin, yang dibuat dari campuran putik kurma dan kurma matang.⁴⁸

Dalam pandangan ulama, hal yang dapat dipastikan adalah mengkonsumsi segala sesuatu, baik dalam bentuk cairan atau benda padat, yang mengandung unsur-unsur tertentu yang dalam kadar tertentu dapat merusak fungsi akal, hukumnya adalah haram, apakah menurut kenyataannya sampai mabuk atau tidak, dalam kadar sedikit atau banyak. Termasuk dalam kategori ini minuman beralkohol, narkotika dan sejenisnya yang disebut psikotropika atau dalam sebutan narkoba.

Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era moder, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.⁴⁹

⁴⁷ Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri Al-Jinaiy Al Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid V). (pen.) Ali Yafie. et al. Bogor. Kharisma Ilmu. 2008),h. 63

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9*,(Semarang.:Pustaka Rizski Putra. 2001), h. 391

⁴⁹ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Sinar Grafika. 2007), h. 87.

Islam melarang khamr (minuman keras), karena khamr dianggap sebagai induk keburukan, disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta sejak dari semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya.

Prinsip tentang larangan khamr ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal abad 20, negara-negara Islam mulai berorientasi ke Barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah khamr (minuman keras) pada prinsipnya tidak dilarang dan orang yang meminumnya tidak dincam hukuman, kecuali ia mabuk di muka umum. Sementara negara-negara Islam tenggelam dalam pengaruh Barat karena menjadi jajahan negara-negara Barat, negara-negara non-Islam sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye anti minuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.⁵⁰

Larangan meminum khamr dalam AlQur'an tidak diturunkan sekaligus tetapi berangsur-angsur. Hal ini disebabkan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras di kalangan bangsa Arab sudah merajalela. Ayat pertama turun adalah QS. An-Nisa/5:43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ...

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan....⁵¹

Dalam ayat tersebut, Allah SWT melarang kaum muslimin melaksanakan salat dalam keadaan mabuk, karena salat adalah ibadah wajib yang harus ditunaikan, berarti

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Sinar Grafika. 2005),h. 71

⁵¹ Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta:Az-ziyadah), h.85

kaum muslimin diwajibkan untuk tidak mengonsumsi minuman keras dengan kuantitas seperti biasa agar dapat melaksanakan salat lima waktu tidak dalam kondisi mabuk.

Larangan ini mungkin yang mendorong kaum muslim waktu itu untuk bertanya-tanya tentang hukum minuman keras itu sendiri. Setelah itu, turunlah nas (ayat) kedua menjawab segala pertanyaan yang menggajjal di hati mereka dan menerangkan illat (sebab) pelarangan tersebut. Sebagaimana Allah Firman dalam QS. Al-Baqarah/2:219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا...

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, „Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.⁵²

Maksudnya kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah tentang hukum khamr dan judi, dimana pada masa jahiliyah kedua hal tersebut sering dilakukan dan juga pada awal-awal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Oleh karena itu, mereka bertanya tentang hukum-hukumnya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan mudharatnya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan itu secara total.⁵³

Allah mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilang ingatan, harta dan menghalangi diri dari berdzikir kepada Allah, dari salat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan berjual beli khamr atau memperolehnya dengan cara berjudi atau kebahagiaan hati saat melakukannya. Penjelasan ini merupakan pencegahan dari kedua perbuatan tersebut, karena seseorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu

⁵² Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta: Az-ziyadah), h.34

⁵³ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), h. 73

yang kemaslahatannya lebih besar, dan ia akan menjauhi suatu yang mudharatnya lebih besar. Akan tetapi, ketika mereka telah terbiasa dengan kedua perkara tersebut dan sulit untuk meninggalkannya secara total pada awal-awalnya, maka Allah memulai hal tersebut dengan ayat ini sebagai pendahuluan menuju pengharaman secara mutlak.⁵⁴

Dalam hal melarang minuman keras, hukum Islam tidak bersahabat dengan kondisi masyarakat pada saat itu atau dengan kata lain tidak merespon keinginan mereka. Pada saat itu, ide pelarangan minuman sangat jauh dari akal manusia. Masyarakat pada waktu itu tidak siap menerima pelarangan ini. Meski demikian, hukum Islam melarang minuman keras karena itu merupakan keharusan yang harus dipenuhi hukum Islam yang sempurna dan abadi demi kesempurnaan hukumnya. Hukum pelarangan minuman keras ini mengangkat tingkat kedudukan masyarakat dan mengarahkannya kepada keluhuran dan kesempurnaan. Jika dunia non-Islam pada masa kini telah memikirkan pelarangan minuman keras ketika jiwa manusia telah siap menerima pelarangan ini, itu berarti hukum Islam dengan ketetapan pelarangan minuman keras telah menyeru manusia untuk mendahului zaman mereka lebih dari empat belas abad ke depan.⁵⁵

Ada dua unsur tindak pidana meminum minuman keras, yaitu meminum dan berniat melawan hukum.

a. Unsur pertama, meminum

Seseorang tidak dijatuhi hukuman apapun dengan meminum minuman yang sama sekali tidak memabukkan walaupun ia meminumnya dengan niat untuk mabuk meskipun ia telah berbuat dosa kepada Tuhannya. Untuk memenuhi unsur meminum, minuman tersebut disyaratkan harus diminum.

b. Unsur kedua, melawan hukum

⁵⁴ Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di. *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan*. (Jakarta: Pustaka Sahifa. 2006), h. 350

⁵⁵ Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di. *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan*, (Jakarta: Pustaka Sahifa. 2006), h. 73-74

Seseorang dianggap

berniat melawan hukum jika ia meminum minuman keras (khamr) atau minuman yang memabukkan.⁵⁶

Pada hakekatnya, pengertian minuman keras dan minuman beralkohol tidak sama Sebagaimana yang terdapat Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/MEN-KES/PER/IV/ 77 tentang minuman keras yakni :
dijelaskan bahwa Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C.

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan :

Adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas, yaitu bahwa minuman keras adalah minuman tersebut yang mengandung alkohol, jadi jika minuman tersebut tidak mengandung alkohol atau kadar alkoholnya kurang dari 1% tidak digolongkan sebagai minuman keras.

Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai Klasifikasi, Jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)

⁵⁶ Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di. *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan*, (Jakarta: Pustaka Sahifa. 2006), h. 64-65

- b. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- c. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang memabukan bila diminum misalnya, Beer, Anggur, dan sebagainya (Minuman yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan), penjelasan Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan menurut penjelasan Pasal 537 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukan misalnya Tuak, Saguweer dan sebagainya.

Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif, zat psikoaktif adalah golongan zat yang berkerja secara selektif terutama pada otak yang dapat menimbulkan perubahan pada prilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu keadaan kecanduan atau ketergantungan terhadap jenis zat sesuatu. Seseorang yang menggunakan alkohol mempunyai rentang respon yang berfluktuasi dari kondisi yang ringan sampai yang berat.

Alkohol yang dikenal sehari-hari yang terdapat dalam minuman adalah etanol dengan rumus kimia C_2H_5OH , etanol adalah jenis alcohol yang paling banyak digunakan dalam berbagai industri. Senyawa ini dapat diproduksi dari setiap bahan yang mengandung karbohidrat (gula). Bahan baku yang digunakan beragam seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman palma dan limbah hasil pertanian. Industri etanol telah dikenal cukup lama dan diproduksi secara besar-besaran. Metode pembuatan alkohol dapat dilakukan dengan proses fermentasi atau dengan cara sintetis.

Untuk menyelamatkan umat, terutama umat Islam dari minuman keras serta dampaknya maka dari itu perlu adanya pengantisipasi sejak dini masalah minuman keras ini. Terkhusus pemerintah Daerah harus lebih peka dalam menangani masalah ini. Pemerintah harus lebih serius lagi dan lebih tegas lagi masalah peredaran minuman keras. Apalagi negara kita mayoritas Muslim.

Menurut Hasil keputusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol dalam produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 September 1993 bertempat di Jakarta, merumuskan beberapa pendapat beberapa diantaranya adalah :

- a. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji - bijian, nira, dan lain sebagainya atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C (Per. Menkes No. 86 / 1977).
- b. Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman -minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman beralkohol.
- c. Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk kedalam minuman beralkohol.
- d. Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol.
- e. Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil ataupun keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

D. Ketentuan Hukum tentang Minuman Keras dan Dampak Minuman Keras

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / Menkes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

Adapun uraian dari ketentuan di atas adalah :

Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men-Kes/Per/IV/77 tentang Minuman beralkohol.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/ M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol Pasal 34 mengemukakan bahwa:

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 / Men-Kes /

Per / IV / 77 Tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf f di jelaskan bahwa :

Untuk menjual minuman keras harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Akibat meminum minuman beralkohol, dalam perasaan seseorang akan berubah, orang menjadi tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu. Adapun akibat dari penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dan tidak terkendali :

- a. Akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Tingginya kasus tindak pidana, pelanggaran lalu lintas dan gangguan Keamanan Ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) yang diawali, disertai, bahkan diakhiri oleh pengguna minuman beralkohol.
- c. Kebiasaan menggunakan minuman beralkohol yang secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas pembangunan daerah;
- d. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan, fisik maupun kejiwaan dengan segala akibatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang tinjauan kriminologi terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang dari tahun 2013-2016 adalah *empiris* yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta di dalam masyarakat mengenai findakan penyebab terjadinya Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang dari tahun 2013-2016 dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang dari tahun 2013-2016.

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Batang yang merupakan wilayah hukum Polsek Batang Jeneponto. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena semakin banyaknya jumlah kriminilitas yang ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Jeneponto khususnya perkelahian yang terjadi akibat minuman keras. Dimana kejahatan 97% diakibatkan dari minuman keras terutama perkelahian.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian mengenai Perkelahian Akibat Minuman Keras dari tahun 2013-2016 di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepolisian Kecamatan Batang secara tidak langsung dengan cara mempelajari arsip dan data-data mengenai kasus Perkelahian Akibat Minuman Keras dari tahun 2013-2016.

D. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

a. Observasi (*Observation*)

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Perkelahian Akibat Minuman Keras dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dari tahun 2013-2016.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan ada relevansinya dengan permasalahan. Teknik wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan tertulis dan tersusun, tetapi melalui wawancara langsung tanpa membacakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan secara terpisah dengan mendatangi para responden.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan perkelahian akibat minuman keras dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang dari tahun 2013-2016.

E. Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dan hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang nyata dan dengan menggunakan kata-kata sehingga

diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Fokus dalam penelitian ini adalah tindakan yang menyebabkan perkelahian akibat minuman keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pikak Kepolisian Kecamatan Batang, Toko Agama, Toko Masyarakat, dan Masyarakat. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dasar Hukum Polsek Batang

- a. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Resort dan Kepolisian Sektor.

2. Wilayah Hukum Polsek Batang

Dalam Mengemban Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian, sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat, Polsek Batang bertanggung Jawab pada 2 (dua) Wilayah Kecamatan. Yaitu Kecamatan Batang dan Kecamatan Tarowang, Adapun Wilayah kecamatan masing-masing;

KEC. BATANG

Kelurahan Togo-togo

Kelurahan Bontoraya

Desa Bungeng

Desa Camba-camba

Desa Kaluku

Desa Maccini Baji

KEC. TAROWANG

Desa Bontorappo

Desa Pao

Desa Tarowang

Desa Allu Tarowang

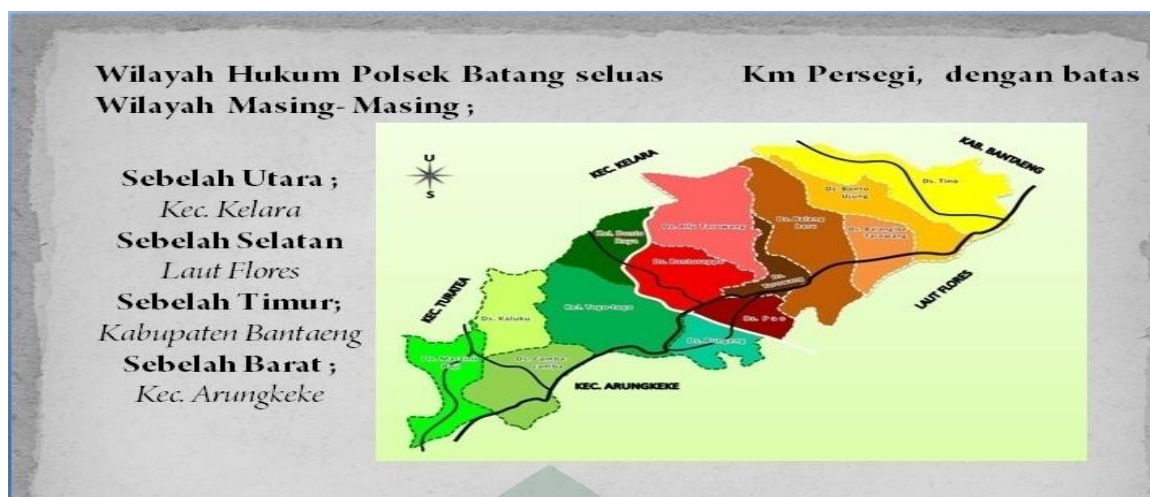
Desa Balang Beru

Desa Balangloe Tarowang

Desa Bonto Ujung

Desa Tino⁵⁷

⁵⁷ Sumber data dari Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto.



3. Ruang Lingkup Polsek Batang

Ruang lingkup Polsek Batang meliputi Aspek Tri Gatra, Panca Gatra dan Ipoleksosbud yang ada di wilayah Kecamatan Batang dan Tarawang.

1. Tri Gatra

a. Geografi

Luas dan Batas wilayah Kecamatan Batang dan Tarawang terletak di ujung timur dari Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah 103.63 Km² yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kelara
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Barat : Kecamatan Arungkeke

b. Demografi

1) Jumlah penduduk

Untuk wilayah Kecamatan Batang dan Kecamatan Tarawang menurut kelamin sebagai berikut :

- Kecamatan Batang jumlah penduduk : 41,090 jiwa yang terdiri dari :
 - Laki – Laki sejumlah : 19.903 jiwa
 - Perempuan sejumlah : 21.187 Jiwa
- Kecamatan Taroang jumlah penduduk : 16,954 jiwa yang terdiri dari :

Laki – Laki sejumlah : 8.177 jiwa

Perempuan sejumlah : 8.777 Jiwa

2) Pemerintahan.

- Kecamatan Batang terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 4 (empat) Desa.
- Kecamatan Taroang terdiri dari 8 (delapan) Desa.
- Kedua wilayah Kecamatan tersebut diatas masih dinaungi oleh wilayah hukum Polsek Batang.

3) Sumber dan hasil kekayaan alam

Sumber kekayaan alam berupa :

- Pertanian
- Perkebunan dan
- Perikanan

2. Panca Gatra

a. Idiologi.

Masyarakat Kecamatan Batang dan Tarowang pada umumnya masih menerima Pancasila sebagai Azas tunggal Negara Republik Indonesia.

1) Politik.

Kecamatan Batang memiliki 2 (dua) Kelurahan dan 4 (empat) Desa, sedangkan Kecamatan Tarowang membawahi 8 (Delapan) Desa.

Sosial Ekonomi

- Untuk harga sembilan bahan pokok diwilayah hukum Polsek Batang untuk daya beli masyarakat masih dapat terjangkau walaupun selama ini telah mengalami beberapa kali kenaikan harga sembako.
- Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah dan kurangnya lapangan kerja bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang ada sehingga sana sini berhamburan pengangguran.

- Karena kurang lapangan kerja maka sebahagian kecil warga masyarakat banyak meninggalkan kampung halaman untuk keluar daerah dengan tujuan untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya (isteri dan anaknya).

Sosial budaya.

➤ Bidang Pendidikan.

- Penyelenggaraan pendidikan dan proses mengajar di Kecamatan Batang dan Taroang cukup lancar.

➤ Bidang Agama.

- Jumlah Penganut agama Islam untuk Kecamatan Batang dan Tarowang 99,09 %, sedangkan untuk non Islam : 0,01 %. Jumlah Mesjid Mushalla dan Langgar sebagai berikut :

Kecamatan Batang : 24 Mesjid, 2 Mushalla, dan 10 buah langgar.

Kecamatan Tarowang : 27 Mesjid, 1 Mushalla, dan 17 buah langgar.

Karakteristik Kecamatan Batang dan Tarowang pada umumnya berdarah panas dan emosional serta mudah tersinggung dan masih dominan timbulnya gangguan Kamtibmas berupa Penganiayaan/perkelahian dan Pembunuhan serta sistem kekeluargaan dan famili yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya kasus – kasus perkelahian dan pengeroyokan yang bermodus karena “ SIRI “ dan kasus tanah.

➤ Bidang Kesehatan.

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk Kecamatan Batang dan Tarowang masing – masing sebagai berikut :

Kecamatan Batang terdapat 1 buah Kantor Puskesmas dan Kantor Pustu.

Kecamatan Tarowang terdapat 2 buah Kantor Puskesmas dan Kantor Pustu.

Hankam

➤ TNI – AD

Kantor Koramil Batang 1405 terletak di Ibu Kota Kecamatan Batang tepatnya di Kelurahan Togo – Togo.

➤ POLISI.

Kantor Polsek Batang yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Batang tepatnya di Kelurahan Togo – Togo, sedangkan Kantor Pos Polisi berkedudukan di pelabuhan Bungeng, Desa. Bungeng.

➤ HANSIP / KAMRA

- Hansip / Kamra yang ada di Kecamatan Batang sebanyak 62 Orang sedangkan Hansip / Kamra yang dibina oleh Polri sebanyak 35 orang.
- Hansip / Kamra yang ada di Kecamatan Tarowang sebanyak 100 Orang sedangkan Hansip / Kamra yang di bina oleh Polri Sebanyak 75 Orang.

➤ PAM SWAKARSA (FORUM PEDULI KAMTIBMAS)

Forum peduli kamtibmas selaku PAM SWAKARSA terbentuk sejak tanggal 12 Januari 2000.

➤ POS KAMLING

- Pos Kamling : 104 Unit
- Aktif : 95 Unit
- Pasif : 8 Unit
- Tipe A & B : 1 Unit
- Tipe C : 55 Unit

Tahanan / Data Tahanan G. 30 S / PKI adalah merupakan bahaya laten, walaupun kegiatannya tidak nampak oleh karenanya pendataan Eks G. 30 S / PKI sebagai berikut :

Golongan A : Nihil

Golongan B : Nihil

Golongan C : Nihil

Stabilitas dibidang HANKAM cukup mantap dan terkendali pada 3 Tahun terakhir sehubungan dengan terjalinnya hubungan yang harmonis dengan Anggota Tripika serta keberadaan pengamanan Swakarsa melalui Forum peduli Kamtibmas.⁵⁸

3. Tugas Pokok Polsek Batang

Polsek Batang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok Polsek Batang adalah melaksanakan tugas kepolisian secara terpadu dengan aparat instansi serta kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda maupun kepada Forum Peduli Kamtibmas, sebagai mitra Polri dan sebagai PAM Swakarsa dalam rangka menciptakan dan Memantapkan situasi Kamtibmas yang kondusif di Wilayah Hukum Polsek Batang dan menitik beratkan yaitu mengutamakan pencegahan dan penangkalan gangguan Kamtibmas secara terpadu, menumbuh kembangkan sikap mental serta daya tangkal masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing dengan penerapan system Kamtibmas Swakarsa dalam rangka terciptanya 6 out put Kepolisian antara lain :

- a. Terkendalnya Crime total dan Laka Lantas
- b. Meningkatkan Penyelesaian Perkara
- c. Terciptanya Kamtibcar lantas
- d. Meningkatkan bela Siap Polri

⁵⁸ Sumber data dari Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto.

- e. Meningkatkan deteksi dini terhadap hal-hal yang akan terjadi serta meningkatkan daya tangkal dan daya cegah
- f. Polri makin tertib dan berwibawa dan makin professional.

4. Tanah Bangunan, Kenadaraan dan Peralatan

a. Tanah Bangunan

Tanah : 1 Lokasi Seluas 7.500 M3

Gedung Kantor : 1 Unit seluas 145 M3

Rumah Dinas : 1 Unit seluas 135 M3

Asrama : 1 Couple terdiri dari 4 Unit (Swadaya)

b. Kendaraan

Sepeda Motor (R2) : Unit

Mobil (R4) : 2 Unit

c. Peralatan

• Senjata Genggam : Pucuk

• Bahu : Pucuk

• Amunisi : Butir

• Megaphone : 2 Unit

• Alat TKP : 2 Set

5. Jumlah Personil

Jumlah Personil untuk Polsek Batang sebanyak 26 Orang Sbb;

- AKP : 1 Orang
- AIPTU : 6 Orang
- AIPDA : 2 Orang
- BRIPKA : 11 Orang
- BRIGADIR : 5 Orang

- BRIPDA : 1 Orang⁵⁹

Tabel 1

Daftar Nama Personil yang Bertugas di Wilayah Hukum Polsek Batang

No	Nama	Pangkat/NRP	Lurah/Desa	SKEP	KET
1	Ichsyam Syam	BRIPKA/84031097	Kel.Togo-Togo Desa.Camba Camba	Ada	
2	Wawan, S.Sos	AIPTU/3060315	Desa Maccinibaji Desa Kaluku	Ada	
3	Hamka	BRIPKA/81090883	Desa. Bungeng Kel. Bontoraya	Ada	
4	Syamsu Alam	BRIPKA/83051222	Desa Pao, Desa Bontoraya	Ada	
5	Syamsu Alam	BRIPKA/85110327	Desa Baltar Desa Balang Baru	Ada	
6	Hasbullah	BRIGPOL/85111469	Desa Allu Tarawang Desa Tarawang	Ada	
7	Rahmat Wadi	BRIGPOL/78051013 4	Desa Bonto Ujung Desa Tino	Ada	

Sumber Data: Data dari Polsek Kecamatan Batang

6. Tugas Pokok Jajaran Polsek Batang

a. Tugas Pokok Kapolsek

Tugas Pokok Kapolsek yaitu:

- 1) Kapolsek merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres

⁵⁹Sumber data dari Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto

2) Kapolsek Bertugas:

- Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas,
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Tugas Pokok Waka Polsek

Tugas pokok Waka Polsek yaitu:

- 1) Wakapolsek merupakan unsure pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek.
- 2) Wakapolsek bertugas:
 - Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dan mengawasi, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek.
 - Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek Berhalangan.
 - Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

c. Tugas Pokok Unit Reskrim

Tugas pokok Reskrim yaitu:

- 1) Unit Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
- 2) Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Unit Reskrim melaksanakan fungsi:
 - Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

- Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun sebagai korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengidentifikasi untuk kepentingan penyidikan.

Unit Reskrim dipimpin oleh Kanitreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.⁶⁰

B. Gambar Peta

1. Gambar Peta Kerawanan

Dalam Wilayah Hukum Polsek Batang membentang jalan Utara yang menjadi perlintasan arus dari atau ke Ibu Kota Provinsi Sulsel yakni Kota Makassar-Bantaeng-Bulukumba-Sinjai, sepanjang \pm 45 KM dalam kondisi Baik dan terdapat beberapa kerawanan lalu lintas yakni:

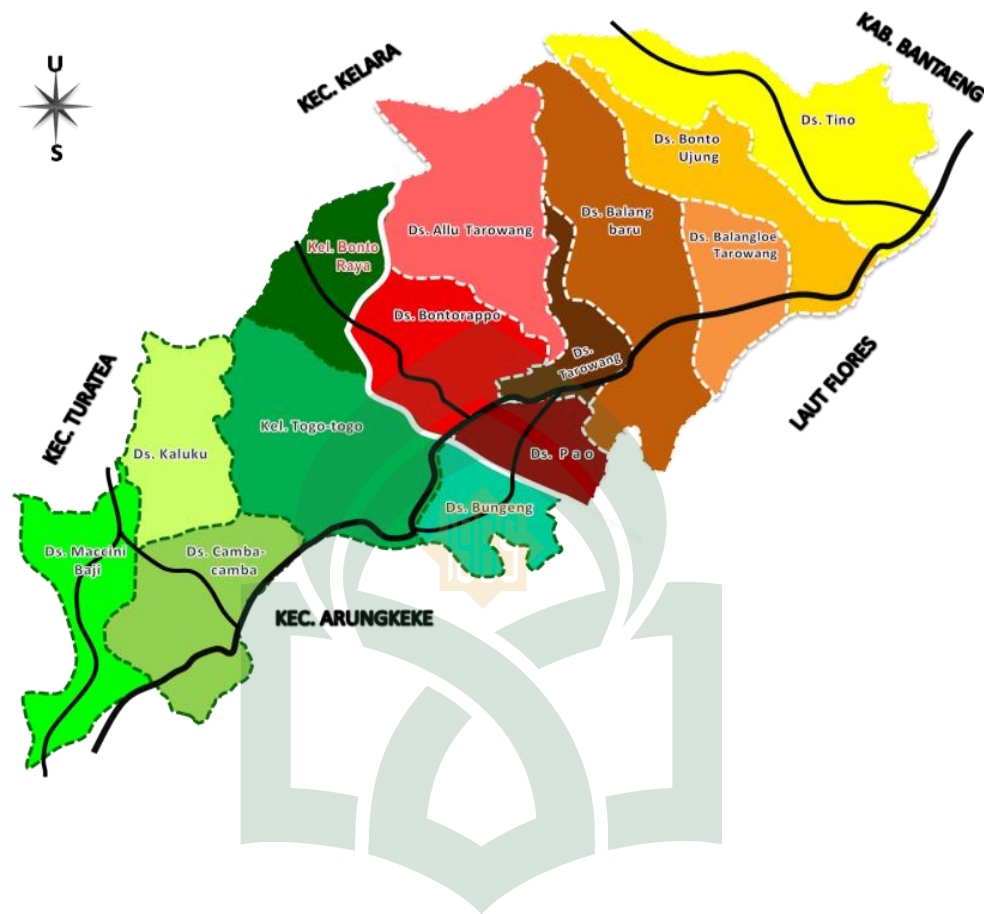
RAWAN LAKA

- Jalan lurus di desa tino
- Tikungan melengkung dan terjal di kua-kuala desa
- Tikungan bersimpangan di Capponga Togo-togo
- Jalan melengkung di camba-camba

RAWAN MACET

- Pasar Tarawang
- depan SMA 2 Batang

⁶⁰Sumber data dari Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto



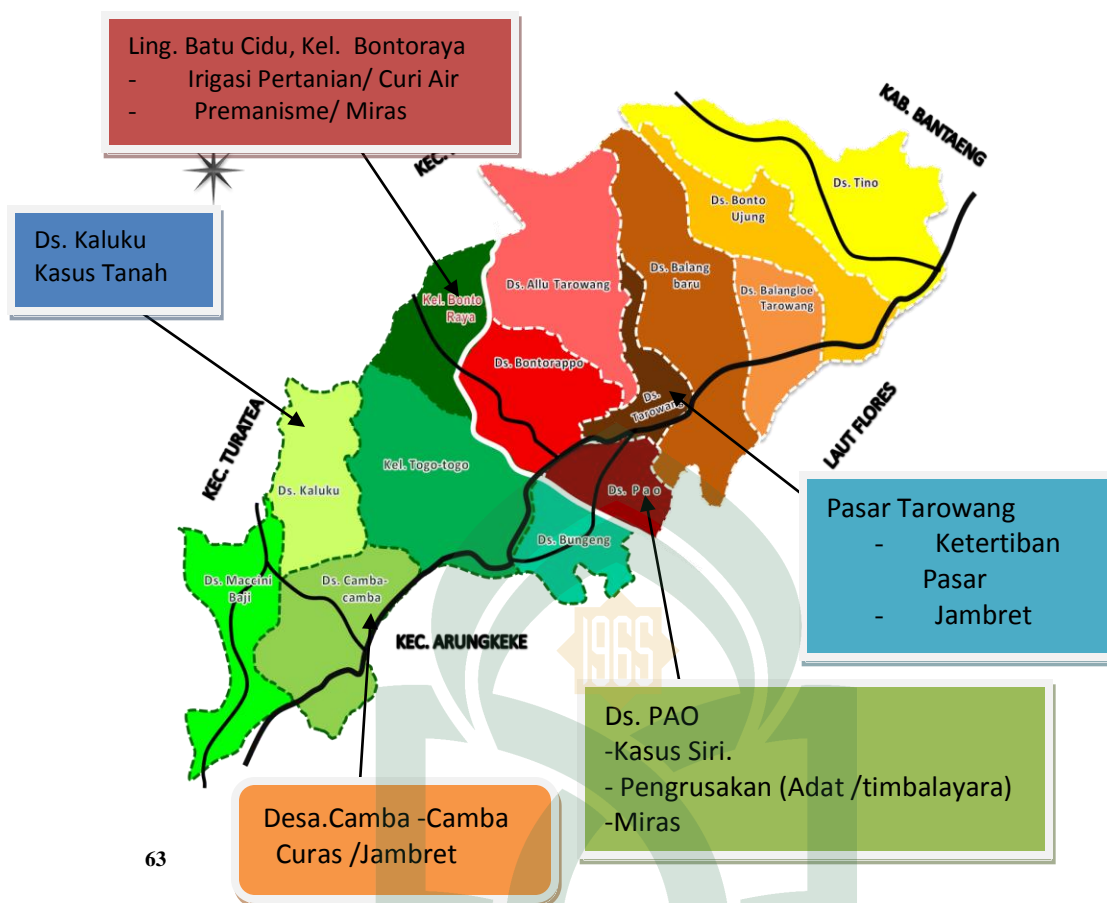
2. Gambar Peta Rawan Kejahatan

Dalam Wilayah Hukum Polsek Batang, beberapa wilayah yang menjadi perlintasan pelaku kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat ketika melintasi daerah tersebut. Pelaku terkadang tidak tanggung-tanggung dalam melancarkan aksinya guna mendapatkan apa yang menjadi incara para pelaku kejahatan. Dimana wilayah itu terdapat di beberapa titik terutama yang menjadi wilayah perbatasan, adapun peta kerawanannya yaitu:

⁶¹Sumber data dari Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto

eta Rawan Konflik

⁶²Sumber data dari Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto



63

C. Data Perkelahian Akibat Minuman Keras

Setelah melakukan penelitian maka penulis dapat memaparkan beberapa data yang bersangkutan dari perkelahian akibat minuman keras. Antara lain yaitu:

⁶³Sumber data dari Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto

Table 2
Data jumlah kasus perkelahian akibat minuman keras

Tahun	Jumlah kasus yang diaporkan	Umur
2013	21	20-45 tahun
2014	22	25-45 tahun
2015	29	20-40 tahun
2016	42	20-40 tahun
jumlah		114

Sumber Data: Data dari Polsek Kecamatan Batang dari tahun 2013-2016.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kasus Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang dari tahun 2013-2016 sebanyak 114 Kasus. Walaupun fakta di lapangan masih banyak kasus Perkelahian Akibat Minuman keras yang tidak diselesaikan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian menganggap bahwa masyarakat masih banyak yang belum sadar hukum sehingga ketika terjadi perkelahian akibat minuman keras mereka diam saja dan menganggap hal ini adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan mereka padahal kasus tersebut sangat meresahkan ketentraman dalam kehidupan masyarakat akan tetapi tetap saja diantara mereka masih saja diam dan seakan acuh tak acuh. Padahal pihak kepolisian sangat berharap adanya kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat dalam hal ini.⁶⁴

⁶⁴ Muh. Akrif, S.sos, KANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto, wawancara, 6 April 2017.

Tabel 3
Penanganan Kasus perkelahian akibat minuman keras

Tahun	Penanganan		Ket.
	Ditahan	Pelaku melarikan diri	
2013	18	2	19
2014	21	-	21
2015	17	5	22
2016	34	8	42

Sumber Data: Data dari Polsek Kecamatan Batang dari tahun 2013-2016.

Berdasarkan tabel diatas penanganan kasus perkelahian akibat minuman keras dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 pelaku ditahan sebanyak 18 kasus dan 2 kasus pelaku melarikan diri, pada tahun 2014 pelaku ditahan sebanyak 21 kasus, tahun 2015 pelaku ditahan sebanyak 17 kasus dan 5 kasus melarikan diri, serta pada tahun 2016 pelaku ditahan sebanyak 34 kasus sedangkan 8 kasus pelaku melarikan diri.

Menurut Muh. Akrif, S.sos, KANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Batang, pada umumnya pelaku perkelahian akibat minuman keras itu ditahan selama beberapa beberapa bulan kemudian setelah dianggap cukup masa penahanannya para pelaku dibebaskan dan kedua belah pihak diperdamaikan satu sama lain. Terkadang kasus perkelahian akibat minuman keras ini pelaku melarikan diri keluar daerah selama beberapa bulan bahkan tahun sehingga kami pihak kepolisian tidak dapat menangkapnya dan memberikan hukuman kepada pelaku, ini adalah salah satu cara bagi pelaku dalam menghindari hukuman dari pihak kepolisian. Hal ini juga disayangkan bagi pihak kepolisian apabila terjadi perkelahian seperti ini akan tetapi pelaku utamanya melarikan diri dan kami tidak dapat menemukannya pada saat itu juga.⁶⁵

⁶⁵Muh. Akrif, S.sos, KANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto, wawancara, 6 Juni 2017.

Table 4
Data kasus perkelahian akibat minuman keras yang tidak
dilaporkan ke pihak Kepolisian

Tahun	Nama	Umur	keterangan
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Jusran • Saroddin • Jumakka 	16 tahun 33 tahun 35 tahun	Siswa SMA pengangguran pengangguran
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Nassa DG Rate • Jamaluddin • Basoddin • Dg Nai' 	40 tahun 22 tahun 38 tahun 42 tahun	Sopir Pengangguran pengangguran Petani
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Amri • Ikbai • Olla • Renaldi 	45 tahun 40 tahun 16 tahun 16 tahun	Petani pengangguran Siswa SMA Siswa SMA
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Hamka • Sattu • Ciceng 	16 tahun 36 tahun 43 tahun	Siswa SMA Pengangguran pengangguran
jumlah	15 orang		

Sumber Data: Penelitian Lapangan dan Hasil Wawancara Pelaku Tahun 2013-2016.

Berdasarkan tabel di atas Kasus perkelahian akibat minuman keras di Kecamatan Batang banyak yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Bahkan terdapat pelaku anak dibawah umur. Anak dibawah umur sebanyak 4 (empat) orang pelaku dan orang dewasa sebanyak 11 (sebelas) orang pelaku tahun 2013-2016. Kebanyakan pelaku dari yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Banyaknya kasus yang tidak ditangani oleh kepolisian diakibatkan kurangnya kerja sama antara pihak kepolisian dan masyarakat. Banyak di antara masyarakat yang lebih memilih melaporkannya ke pemerintah setempat dan menyelesaikan tindakan perkelahian akibat minuman keras secara kekeluargaan dari pada harus melaporkannya ke pihak yang berwajib. Ini berlaku dikarenakan berbagai pertimbangan di masyarakat. Antara lain, mereka tidak ingin keluarga mereka harus ditahan oleh pihak kepolisian dan

masih banyak masyarakat yang tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib karena pelaku mulai dari anak dibawah umur sampai orang dewasa. Apalagi yang melakukan itu anak dibawah umur dan masih sekolah, keluarga mereka takut jika anak mereka tidak masuk sekolah.⁶⁶

Tabel 5
Data akibat yang ditimbulkan dari perkelahian akibat minuman keras

No	Akibat
1	Keresahan dalam masyarakat
2	Terganggunya Ketertiban
3	Banyaknya permusuhan

Sumber Data: Data dari Polsek Kecamatan Batang dari tahun 2013-2016.

1. Keresahan dalam Masyarakat

Hal ini dirasakan oleh masyarakat setempat ketika perkelahian terjadi antara masyarakat akibat minuman keras karena pelaku ketika melakukan perkelahian keadaan kedua belah pihak tidak dalam keadaan normal. Bahkan pelaku sampai melakukan tindakan yang lebih dari perkelahian. Mereka bisa sampai melakukan tindakan percobaan pembunuhan. Emosi yang meluap-luap yang membuat mereka lupa diri untuk bisa mengontrol emosi yang sangat sulit dilakukan oleh pelaku. Inilah yang membuat masyarakat merasa terusik.

2. Terganggunya Ketertiban

Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sangat dibutuhkan guna terciptanya masyarakat hidup rukun. Akan tetapi ketika terjadi sebuah masalah yang mengusik ketenangan masyarakat maka apa yang diharapkan oleh masyarakat

⁶⁶Syamsuddin, Masyarakat Kecamatan Batang, Wawancara, 7 April 2017.

tidak dapat terpenuhi. Dalam hal ini perkelahian akibat minuman keras sangat membuat ketertiban masyarakat terganggu, mereka membuat kegaduhan di tengah jalan sehingga menghambat jalan masyarakat.

3. Banyaknya Permusuhan

Akibat yang ditimbulkan yang terakhir yaitu banyaknya permusuhan antar masyarakat. Ini disebabkan karena kedua belah pihak telah terjadi cekcok dan tidak sedikit keluarga kedua belah pihak juga terseret untuk tidak saling tegur sapa antar sesame tetangga. Ini terjadi karena keluarga kedua belah pihak masing-masing menganggap pihaknya yang benar. Padahal jika dilihat kenyataannya terkadang kedua pelaku sama-sama bersalah karena duanya telah kehilangan akal sehat sehingga terjadi perkelahian.⁶⁷

Table 6
Data tingkat pendidikan pelaku perkelahian akibat minuman keras

Tingkat pendidikan	Jumlah	Persen
SD	20 orang	18%
SMP	15 orang	13%
SMA	15 orang	13%
Tidak pernah sekolah	64 orang	56%
Total	114 orang	100%

Sumber data: data dari Polsek Batang Kabupaten Jeneponto.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pelaku dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 18%, tingkat pendidikan SMP sebanyak 13%, tingkat SMA sebanyak 13%,

⁶⁷Muh. Akrif, S.sos, KANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto, wawancara, 6 April 2017.

Tidak pernah sekolah sebanyak 56%. perkelahian akibat minuman keras juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Seperti yang tertera di tabel pelaku terbanyak adalah yang tidak pernah sekolah.

Pengaruh lingkungan pada masyarakat petani yang masih buta huruf adalah sangat relatif sekali dan konstan.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang melakukan hal demikian tidak dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Bisa saja dilakukan oleh siapa saja karena tidak bisa mengontrol diri. Apalagi yang tidak paham dengan ajaran Agama kita selaku umat Muslim. Di era saat sekarang ini apa saja bisa terjadi. semua seakan mudah dilakukan oleh banyak orang. Peran orang tua dan keluarga sangat dibutuhkan. Jika dalam sebuah keluarga memiliki tatanan hidup yang baik dan teratur maka akan lebih mudah tercipta masyarakat yang aman dan damai. Karena semua hal positif harus berasal dari keluarga. Kemudian lingkungan sekitar juga harus mendukung menciptakan perilaku yang positif. Memang hal demikian tidaklah mudah akan tetapi jika semua pihak bekerjasama dalam membangun masyarakat yang tentram dan damai maka tidak menutup kemungkinan apa yang diharapkan oleh masyarakat luas dapat tercapai.

Hal ini terlihat di Negara Tiongkok di mana pengaruh lingkungan keluarga besar sekali dalam menentukan karier dan cita-cita hidup. Adanya kerja sama antara individu dan kelompok dalam segala keadaan, tetapi kelompok keluarga besar ini selalu ada hubungan dengan masyarakat sekelilingnya.⁶⁸

⁶⁸ Ninik Widiyanti & Yulias Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 107.

D. Tindakan Sehingga Terjadi Perkelahian Akibat Minuman Keras Di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

Table 7
Tindakan pelaku sehingga terjadinya perkelahian akibat minuman keras

No	Tindakan	jumlah	Persen (%)
1	Adu mulut/cerita kejagoan	10	8%
2	Unjuk kebolehan	51	45%
3	Emosi tidak stabil	53	47%
Jumlah		114	

Sumber data: data dari Polsek Batang Kabupaten Jeneponto.

Dari table di atas yang paling banyak tindakan pelaku sehingga terjadi perkelahian yaitu ujuk kebolehan sebanyak 47%, kemudian adu mulut/cerita kejagoan sebanyak 45% dan saling mengejek sebanyak 8%.

1. Adu Mulut/Cerita Kejagoan

Perkelahian akibat minuman keras terjadi karena adanya tindakan dari pelaku mereka bercerita dan saling menantang menganggap diri merekalah yang paling jago diantara orang yang ada di sekitar tempat tersebut. bahkan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyingung sesama peminum. Mereka biasa mengeluarkan kata-kata bahwa “sayalah yang paling jago di tempat ini, saya tidak takut dengan siapa pun itu”.

2. Unjuk Kebolehan

Pelaku apabila telah meminum minuman keras maka pelaku pada umumnya ke jalan berkoar-koar dan menepuk dada untuk menantang siapa saja. Atau sesama

peminum saling menantang satu sama lain. Mereka terkadang masing-masing ingin menunjukkan bahwa diri mereka yang terkuat. Hal ini pada umumnya terjadi jika mereka menganggap itu adalah “siri” (“harga diri” perumpamaan dalam bahasa Makassar). mereka menganggap apabila ada tantangan dari seseorang kemudian mereka diam saja “siri” (“harga diri” perumpamaan dalam bahasa Makassar) mereka tidak dihargai.

3. Emosi Tidak Stabil

Hal ini yang sangat sensitif karena berkaitan dengan emosi yang tidak bisa mereka control ketika terjadi gesekan antar peminum. Apalagi watak mereka yang berdarah panas maka sangat mudahlah mereka tersulut emosi sehingga mengakibatkan pekelahian. Akal sehat mereka telah hilang mereka tidak dapat lagi berfikir dengan jernih, apalagi jika pelaku memiliki latar belakang yang tempramen (pemarah).⁶⁹

Terjadinya hal tersebut di atas merupakan perbuatan yang membutuhkan penanaman kaedah yang positif terhadap masyarakat dimana kaedah itu merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana yang diharapkan. Orang-orang yang memilih melakukan hal itu, oleh karena dia percaya bahwa dia menghayati perilaku yang diharapkan dari pihak lain terhadap perlakuannya. Kaedah-kaedah itulah yang menghubungkan dari segi batiniah dari pribadi-pribadi yang memilih dengan masyarakat di sekelilingnya. Oleh karena itu untuk menjelaskan mengapa seseorang menentukan pilihan-pilihan tertentu maka harus pula dia pertimbangkan anggapan-anggapan tentang apa yang harus dilakukan oleh lingkungannya. Inilah merupakan struktur normatif yang terdapat pada diri manusia, yang sekaligus merupakan potensi di dalam dirinya untuk

⁶⁹ Muh. Akrif, S.sos, KANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto, wawancara, jeneponto, 6 April 2017.

dapat merubah perlakuannya melalui perubahan-perubahan terencana di dalam wujud penggunaan kaedah-kaedah hokum atau perundang-undangan sebagai sarana.⁷⁰

E. Hambatan Aparat Keolisian dalam Menanggulangi Perkelahian Akibat Minuman Keras

1. Kurangnya Kerjasama Antara Aparat Kepolisian dan Masyarakat Setempat

Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat sekitar karena masyarakat seringkali beranggapan bahwa Polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Akan tetapi terkadang masyarakat memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan karena dengan berbagai alasan, mereka tidak ingin keluarga ditahan dan sebagainya. Padahal kasus perkelahian akibat minuman keras bukan hal sepele yang hanya bisa dengan penyelesaian tanpa pihak berwajib, karena tindakan ini sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. Bahkan efek jerah juga tidak terwujud bagi pelaku.⁷¹

Jika mekihat hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya telah banyak yang tidak percaya lagi dengan kinerja kepolisian sehingga dalam penanganan kasus seperti ini banyak masyarakat di lapangan yang lebih memilih diam dan tidak melaporkan beberapa tindak kejahatan kepihak yang berwajib.

2. Adanya Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Aparat Kepolisian) dalam Menangani Masalah Tersebut

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak perkelahian akibat minuman keras yang di kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, maka polisi dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat,

⁷⁰ Ninik Widiyanti & Yulias Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 34-44.

⁷¹ Muh. Akrif, S.sos, KANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto, wawancara, jeneponto, 6 April 2017.

karena pada umumnya tenaga penyidik pada Polsek Batang sebagian besar belum memiliki pengalaman atau wawasan yang luas sebelum diangkat menjadi penyidik dalam menangani tindak pidana tersebut untuk dapat menekan terjadinya perkelahian akibat minuman keras. Personil Polsek Batang masih kurang dibanding dengan jumlah penduduk serta luas wilayah. Personil Polsek Batang masih sebagian yang kurang disiplin dan tidak menuntaskan tugas yang dibebankan kepadanya.⁷²

Jika melihat dari data personil Kepolisian Batang bisa dikatakan Personil sangat terbatas karena hanya terdiri dari 26 orang sementara luas wilayah 103.63 km². Dengan penduduk yang banyak dengan jumlah penduduk 41,090 jiwa untuk wilayah hukum kecamatan Batang dan 16,954 jiwa untuk wilayah hukum kecamatan Tarowang. Karena kepolisian Batang menaungi 2 wilayah hukum yaitu Kecamatan Batang dan Tarowang. Ditambah dengan masyarakat yang memiliki darah panas yang dengan gesekan sedikit saja akan terjadi konflik. Baik itu perkelahian, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya.⁷³

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak perkelahian akibat minuman keras di kecamatan Batang, maka polisi dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada umumnya tenaga penyidik pada Polsek Batang sebagian besar belum memiliki pengalaman atau wawasan yang luas sebelum diangkat menjadi penyidik dalam menangani tindak pidana tersebut. Terbatasnya sarana dan prasarana ini termasuk didalamnya adalah kurangnya fasilitas kendaraan dinas yang dimiliki oleh Polsek Batang untuk mengadakan kegiatan patrol

⁷² Muh. Akrif, S.sos, KANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto, wawancara, jeneponto, 6 April 2017.

⁷³ Muh. Akrif, S.sos, KANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto, wawancara, jeneponto, 6 April 2017.

secara rutin pada setiap wilayah hukum yang dianggap rawan dan memerlukan pengawasan setiap saat.⁷⁴

F. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Masalah Tersebut

Untuk dapat menekan terjadinya tindak perkelahian akibat minuman keras di Kecamatan Batang diperlukan upaya-upaya penanggulangan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa aparat kepolisian di Polsek Batang khususnya di Sat Reskrim yakni Muh. Akrif, S.sos selaku KANIT RESKRIM, bahwa upaya penanggulangan dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu : pertama adalah penanggulangan secara Represif dan penanggulangan secara Preventif. Kegiatan penanggulangan tersebut selama ini telah dilakukan dan telah terlihat hasilnya walaupun tidak masih jauh dari yang diharapkan.

Adapun upaya penanggulangan yang telah ditempuh oleh pihak kepolisian Batang yaitu:

a. Upaya Represif

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut pihak kepolisian berusaha bertindak maksimal. Dimulai dengan rutin melakukan razia ke tempat-tempat penjualan minuman keras, untuk mencegah maraknya peredaran minuman keras di masyarakat polisi juga melakukan patroli untuk mengantisipasi adanya minuman keras yang beredar dimasyarakat secara berlebihan dan tanpa izin dari pemerintah.

Pihak kepolisian dalam hal upaya menanggulangi tindak tersebut, sudah melakukan beberapa hal pencegahan. Misalnya, yang melalui pendekatan secara agama yang dinamakan KUDA MAS (Kunjungan Dari Masjid ke Masjid). Pihak kepolisian bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama yang ada di dalam wilayah kerja

⁷⁴Syahir Saleh, BANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto, wawancara, 6 April 2017.

Polsek Batang. Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka agama, pihak kepolisian juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat. Dengan memberi pengertian bahwa akibat minuman keras sangat memiliki banyak dampak negatif, apalagi yang berhubungan dengan perkelahian itu adalah salah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya. Bahkan membentuk badan yakni Polisi Peduli Pengangguran, jadi pihak polisi bekerja sama dengan pihak luar negeri untuk mengirim para pengangguran yang memiliki potensi untuk bekerja karena pada umumnya yang banyak melakukan perkelahian akibat minuman keras adalah pengangguran.

Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat Pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil Kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan POLRI untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak Kepolisian untuk mengungkapkan kasus perkelahian akibat minuman keras. Adapun upaya yang dilakukan yaitu:

- 1) Meningkatkan Giat Patroli dan Razia di tempat – tempat rawan gangguan Kamtibmas pada jam – jam tertentu.
- 2) Meningkatkan peran aktif Babinkamtibmas di masing – masing Desa binaannya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat serta mengaktifkan tugas ronda dan berhati-hati dalam menjaga barang-barangnya (Ranmor atau hewannya).
- 3) Penggalangan terhadap Tomas, Toga, Toda dan Forum Peduli Kamtibmas untuk berperan Aktif dalam mengamankan wilayahnya dari segala ancaman / tindak kriminal.

- 4) Melakukan koordinasi dengan unsur Tripika, Instansi terkait dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.
- 5) Peningkatan Kemampuan penyelidikan Reserse dalam mencari dan menemukan bukti awal dari suatu peristiwa tindak pidana utamanya kasus Curanmor dan Curnak.⁷⁵

b. Upaya Preventif

Dalam hal ini bukan hanya pihak kepolisian yang ikut andil di dalamnya akan tetapi juga kerja sama yang kuat antara masyarakat dan juga pemerintah dalam meminimalisir kasus tersebut.

Dalam hal ini penulis mewawancarai 3 (tiga) orang tokoh masyarakat antara lain Muhiddin Bundu, Baktiar. SE, Anwar Talib, S.Pd dan 2 (dua) orang tokoh agama antara lain yaitu, H. safaruddin dan Baharuddin Lallo.

Muhiddin Bundu selaku tokoh masyarakat, bahwa dalam menanggulangi perkelahian akibat minuman keras itu harus dimulai dari bagaimana agar minuman keras tidak mudah didapatkan dimana saja, dalam artian peredaran minuman keras harus tetap dipantau oleh pihak pemerintah. Bukan hanya itu pantauan dari pihak kepolisian juga harus terus diperketat di setiap titik yang dianggap rawan terjadi perkelahian akibat minuman keras. Seperti ketika di suatu tempat terdapat pesta atau perayaan maka pihak kepolisian harus lebih peka dalam menindak lanjutinya.⁷⁶

Baktiar, SE. masyarakat di sini memang sudah menjadi kebiasaan meminum minuman keras dan itu mereka anggap hal biasa hanya saja yang disayangkan tindakan mereka setelah mengkonsumsi minuman keras yang salah karena mereka selalu membuat keresahan dalam masyarakat. Bahkan sampai terjadi pencurian, perkelahian sampai pembunuhan. Maka dari itu diharapkan ada hal-hal baru yang diciptakan pemerintah

⁷⁵Muh. Akrif, S.sos, KANIT RESKRIM Kepolisian Sektor Batang Kabupaten Jeneponto, wawancara, 7 April 2017.

⁷⁶ Muhiddin Bunddu, Tokoh Masyarakat, wawancara, 7 April 2017.

sehingga peminum ini tidak semakin bertambah. Tarulah pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai karena yang kebanyakan yang melakukan adalah pengangguran. Perlunya juga penahanan yang tegas mengenai perkelahian akibat minuman keras ini karena mereka tidak hanya merugikan diri mereka akan tetapi juga merugikan banyak orang, terutama keluarga mereka yang merasa dirugikan dalam hal ini.⁷⁷

Herman Lili, S.Pd, menurut beliau perkara seperti itu bisa terjadi karena kurangnya penahananpenahanan yang tegas dari berbagai pihak baik itu dari pemerintah maupun dari pihak kepolisian apalagi masyarakat yang masih kurang kesadaran pentiungnya hidup rukun antar masyarakat, bahkan masyarakat juga masih memiliki kurang kerjasama dengan pihak kepolisian. Yang jadi hal paling miris disini adalah perkelahian akibat minuman keras tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetap juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Ini juga harus dapat perhatian yang serius dari berbagai pihak agar tidak semakin merajalela.⁷⁸

Selanjutnya H. Safaruddin selaku toko agama, bahwa kebanyakan yang melakukan tindakan perkelahian akibat minuman keras adalah masyarakat awam yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Maka dari itu sosialisasi sangat dibutuhkan baik itu sosialisasi pengetahuan umum maupun pengetahuan agama karena melihat fakta di lapangan jangankan mengerti masalah haramnya berbuat demikian, masalah shalat yang suatu kewajiban setiap muslim saja mereka belum paham. Jadi sangat penting sosialisasi rutin di sampaikan kepada masyarakat, terkhusus pemahaman kasus tersebut. Seharusnya pemerintah membentuk suatu badan yang bisa menangani permasalahan bagaimana menangani masyarakat yang memiliki pemahaman yang sangat awam,

⁷⁷ Baktiar, SE, Kepala Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto, wawancara, 7 April 2017.

⁷⁸ Anwar Talib, Tokoh Masyarakat, wawancara, 7 April 2017.

walaupun kita ketahui dalam menghadapi masyarakat itu tidak mudah akan tetapi ini sangat dibutuhkan demi terjaganya masyarakat yang aman dan damai.⁷⁹

Baharuddin Lallo, pelaku perkelahian akibat minuman keras ini sebenarnya butuh siraman rohani pengajian yang harus dilakukan sedikit demi sedikit dan secara terus menerus. Hal itu tidak bisa dilakukan hanya sekali-sekali saja. Pemerintah harus memfasilitasi bukan hanya itu pihak kepolisian juga harus lebih tegas dalam penanganan perkelahian akibat minuman keras ini. Selain itu sosialisasi mengenai minuman bahaya serta hukum minuman keras juga harus dilakukan secara rutin, penyebaran minuman keras juga harus tetap dalam pantauan pemerintah agar peredarannya tidak secara bebas.⁸⁰



⁷⁹ H. Syafaruddin, Tokoh Agama, wawancara, 8 April 2017.

⁸⁰ Baharuddin Lallo, Tokoh Agama, wawancara, 8 April 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

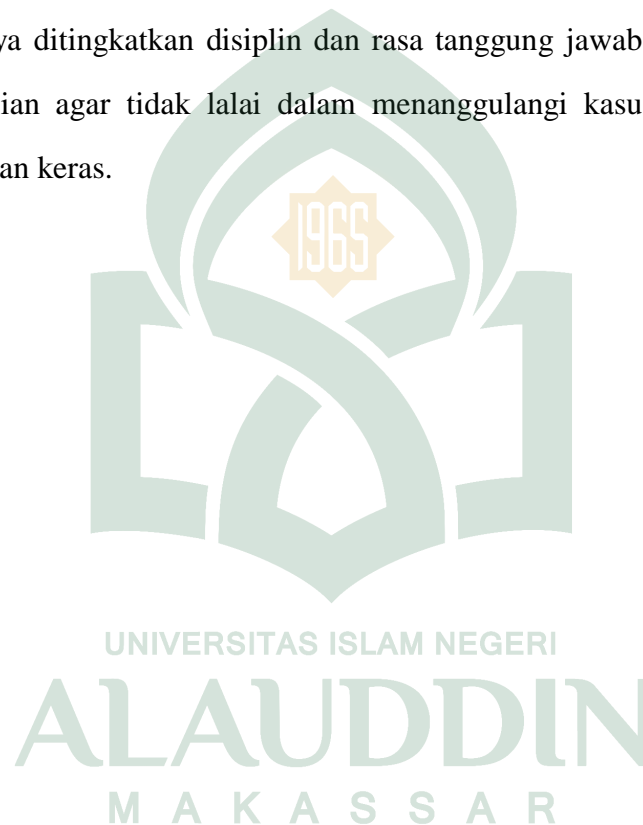
1. Bahwa tindakan Perkelahian Akibat Minuman Keras, sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, berdasarkan data dari kepolisian dan data yang terselubung atau data yang tidak ditangani oleh pihak Kepolisian yang diperoleh selama penelitian di lapangan dan hasil wawancara, yaitu Perkelahian pada Umumnya terjadi dikarenakan saling mengejek, cerita kejagoan dan unjuk kekuatan/kebolehan. Menganggap diri masing-masing yang paling jago dan ingin menunjukkan apa-apa yang mereka anggap kelebihan mereka sehingga terjadi perkelahian.
2. Kejadian seperti ini dapat dicegah atau dinanggulangi dengan melalui 2 cara, yaitu :
 - a. Upaya secara represif
Dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan
 - b. Upaya secara preventif
Dilakukan oleh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah itu sendiri dalam upaya penanganannya.

B. Saran-saran

Adapun saran yang penulis sarankan yaitu:

1. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih professional lagi dalam menangani kasus ini, artinya aparat penegak hukum bisa lebih aktif lagi dalam mencegah agar kasus seperti ini tidak terus terulang, dan sebaiknya memiliki kerjasama yang baik dengan masyarakat setempat agar dalam menangani kasus ini dapat lebih ringan serta dapat diminimalisir.

2. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus ini, sehingga kasus ini dapat diproses secara profesional.
3. Selain itu aparat kepolisian diharapkan berkompeten dalam menangani kasus ini agar lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dalam memberikan upaya-upaya penyuluhan di daerah-daerah yang dianggap rawan. Bahkan pemerintah juga diharapkan kerja sama yang sangat diharapkan agar dapat meminimalisir kejadian seperti tersebut.
4. Perlunya ditingkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab pada setiap anggota kepolisian agar tidak lalai dalam menanggulangi kasus perkelahian akibat minuman keras.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri Al-Jinaiy Al Islamiy Muqaranan Bil Qanunil*
- Wadhi (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid V). (pen.) Ali Yafie. et al. Bogor. Kharisma Ilmu. 2008
- Abussalam. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- A.F Saifuddin. *Konflik dan Integrasi*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- A. Gumilang. *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Alam, A.S dan Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Refleksi Books, 2010.
- Andi Zaenal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Grafika, 1981
- A. Rahman I. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Barda Nawawi Arief. *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: PT. Citra Aditiya Bakti, 1991.
- J.C.T. Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Az-ziyadah
- Moelijatno. *Asas-asas Hukum Pdana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Rusli Efendy. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1983.

- R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- R. Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politea, 1985,
- Saifuddin. A.F. *Konflik dan Integrasi*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sahetapy dan Mardjono Reksodiptro. *Paradoks Dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sayyid Sabiq..*Fiqh Sunnah 9*. Bandung: Al-Ma'arif, 1984
- Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gratindo Persada, 1990
- Syaikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di. *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan*. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9*. Semarang: Pustaka Riszki Putra, 2001
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- W.A. Bongger. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta:PT. Pembangunan, 1982
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2013-2016 ", yang disusun oleh Sri Rahayu, NIM: 10500113092, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 14 Juni 2017, bertepatan dengan 15 Ramadhan-Syawal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 18 Juli 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua:	Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr Jumadi, S.H., M.H.	(.....)
MunaqisyII	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	:Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: St. Nurjannah, S.H., M.H.	(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag
NIP.19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI / MASALAH	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI SEKERTARIS JURUSAN
<p>RUMUSAN MASALAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Factor-faktor yang memepengaruhi perkelahian akibat minuman keras? 2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi masalah perkelahian akibat minuman keras? <p>JUDUL SKRIPSI</p> <p>Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras (Studi Kasus Di Kabupaten Jeneponto Pada Tahun 2013-2016)</p>		<p>19/5/2016</p>  <p>RAHMAT ALAUDDIN NIP 19821207 200901 1 010</p>
<p>RUMUSAN MASALAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa factor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar ? 2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar ? <p>JUDUL SKRIPSI</p> <p>Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus</p>		

Di Wilayah Polres Kabupaten Jeneponto)

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya penegakan UU perlindungan perempuan dan anak dalam rumah tangga di Kabupaten Jeneponto ?
2. Apa kendala dalam menegakkan UU perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

JUDUL SKRIPSI

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten
Jeneponto

PEMBIMBING

HARI/TANGGAL

MENYETUJUI
KETUA JURUSAN

1.

2.

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,
Ketua Jurusan/Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
Di

Samata-Gowa.

Assalamu Alaikum Wa. Wa.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Rahayu
Nim : 10500113092
Semester/Klpk : VI (Enam) /B
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

- Acc 19/5/2016
1. Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras (Studi Kasus Di Daerah Kab. Jeneponto Pada Tahun 2013-2016)
 2. Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Di Wilayah Polre Kab. Jeneponto)
 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jeneponto

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. *Assalamu Alaikum Wa. Wa.*

Samata 19 Mei 2016

Mengetahui,
Penasehat Akademik

(Istiqamah SH.,MH)

NIP.1968011201995032001

Pemohon,

(Sri Rahayu)

Acc 19/5/2016
Judeh

RAHMAN SYAMSUDDIN
NIP 19821207 200901 1 010



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : Tahun 2016

**TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menunjuk saudara : 1. Dr. H. Kasjim Salenda, ~~SH, M.TS~~
: 2. St. Nurjannah, SH., MH

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Sri Rahayu 085397874956
NIM : 10500113092
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Akibat Minuman keras Di Kab. Jeneponto Dari Tahun 2013-2016"

- Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 20 Juni 2016

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Catatan
Submisi 1 yg pembimbing
dasar 2016
Jeneponto
20/06/2016
Widi I

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

***"Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Alibat Minuman Keras di Kecamatan Batang
Kabupaten Jeneponto "***

Disusun dan diajukan Oleh :
Sri Rahayu
NIM: 10500113092


Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan
penulisan skripsi
Pada tanggal : 27 Maret 2017

DOSEN PEMBIMBING


Pembimbing I


Dr. H. Halim Talli, S.Ag
NIP. 197110201997031002

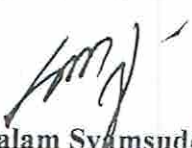
Pembimbing II


St. Nurjannah, SH., MH
NIP. 197608222003122003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Istiqamah SH., MH
NIP. 19680120 199503 2 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar


Prof. Dr. Darusalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 196210160 1990030 1 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 0411-864924, Fax. 864923, Makassar 90221
Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Telp. 0411-841879 Fax. 8221400 Samata-Gowa 92113

MEMO

SRI RAHAYU



Lulus Mengaji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

SAMATA : 27-2-2017

Sifah Chotban.



ALAUDDIN

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 857-Tahun 2017

TENTANG

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 4 April 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kedua** : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Tanggal : 4 April 2017

Dekan, *[Signature]*
Syamsuddin, M.Ag
199003 1 003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 357TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI				PELAKSANA KETUA/SEK/ANG.
		MIKROFIKIH & USUL FIKIH	MIKROUDIS	MIKROPP		
①	Hasriana 10500113002	Dra. Hj. Hartini Tahir, M.Hi	Dr. Kurniati, M.Hi	Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid	
2	Sri Rahayu 10500113092	Andi Intan Cahyani, S.Ag, M.Ag	Dr. Sobrah, M.Ag	Ashabul Kalif, S.Ag, M.H	Dr. Hamsir, M.Hum Drs. Aminullah Nasirah Asri, S.Kom	
3	Isma Sari Ikbal 10500113117	Prof. Dr. H. Usman, M.Ag	Dr. Duding Abdullah, M.Ag	Dr. Hamsir, M.Hum	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. Drs. Aminullah Nasirah Asri, S.Kom	
4	Isma Rahmayani 10500113117	Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I	Dr. Nur Taufik Sanusi, M.Ag	Dr. Jumadi, M.H	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Drs. Aminullah Nurhayati Wahid	
5	Nurul Amalia 10500113085	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	Dr. Darsul S Puyu, M.Ag	Ahkam Jayadi, S.H, M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. Drs. Aminullah Nurhayati Wahid	

Semata, 4 April 2017


Darsul S Puyu, M.Ag


Darsul S Puyu, M.Ag

1016 199003 1 003

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
SEMESTER 8 (.....) WISUDA PERIODE September
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nama : Sri Rahayu

NIM : 10500113092

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan kriminologis terhadap perkeltahan akibat minuman keras di Kecamatan Batang Kabupaten Gempol dari tahun 2013 - 2016

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
3,5	3,5	4	11	3,62

Samata, 8/6 - 2017

Kasubag.
Akademik dan Kemahasiswaan



MUJAHIDAH, S.E

NIP. 19670309 199303 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa. Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : 1457 SI.1/PP.00.9/01/2017
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 27 Maret 2017

Kepada
Yth. **Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan**
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

Di-
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Sri Rahayu
N I M : 10500113092
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Perumnas Antang

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

**"Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras di
Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto"**

Dengan dosen pembimbing:

1. **Dr. H. Halim Talli, S.Ag**
2. **St. Nurjannah, SH.,MH**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Sektor Batang terhitung mulai tanggal 03 April 2017 s/d 03 Juli 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 3714/S.01P/P2T/03/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Jeneponto

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : 1457/SI.1/PP.00.9/01/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SRI RAHAYU**
Nomor Pokok : 10500113092
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN AKIBAT MINUMAN KERAS DI KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 April s/d 03 Juli 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Maret 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 29-03-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tpkpmid.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

Nomor : SK / 75 / III / 2017 / Sek. Batang

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Sektor Batang, menerangkan :

NAMA	: SRI RAHAYU
JENIS KELAMIN	: Perempuan
NOMOR POKOK	: 10500113092
PRORAM STUDI	: Ilmu Hukum.
LEMBAGA	: Universitas Islam Negeri (UIN)
PEKERJAAN	: Mahasiswa
ALAMAT	: Samataring, Desa. Samataring, Kec. Kelara Kab. Jeneponto.

Telah Melakukan Penelitian dan pengambilan data awal yang merupakan syarat penyusunan Skripsi dengan judul :

“ TINJAU KRIMONOLOGIS TERHADAP PEKELAHIAN AKIBAT MINUMAN KERAS DI KECAMATAN BATANG KABUPATEN JENEPONTO “

Yang berlangsung dari tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017

Demikian Surat Keterangan / Izin Penelitian ini dibuat dan akan dipergunakan seperlunya

Togo - Togo 17 Maret 2017

An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BATANG
KANIT RESKRIM

ALA UDDIN
MAKASSAR

MUH. AKRIE, S.Sos
AIPU NRP 75070447

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis skripsi saudara/i Sri Rahayu, Nim.10500113092, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Tinjaun Kriminologi terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2013-2016**". memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar hasil.


Demikian Persetujuan ini dibeikan untuk diperoses selanjutnya.

Gowa, 19 Mei 2017

Pembimbing I


Dr. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.A
NIP. 19711201997031002

Pembimbing II


St. Nuriannah, SH., MH.
NIP. 197608222003122003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 292 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Sri Rahayu
N I M : 10500113092
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Jum.at, 2 Juni 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Tinjauan Kriminologi terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kec. Batang Kab. Jeneponto dari Tahun 2013-2016"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Jumadi, M.H.
Penguji : Dr. Marilang, M.Hum.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
Pada tanggal : Samata
: 30 Mei 2017


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp. (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 109 /SI.I/PP.00.9/ /2017
Sifat : Penting
Lamp :
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 12 Juni 2017

Kepada,

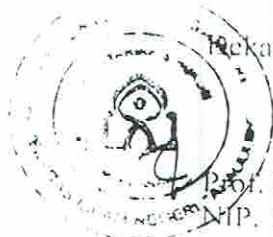
- Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqamah, S.H., M.H. (Sekretaris)
3. Dr. Jumadi, S.H., M.H. (Penguji I)
4. Dr. Marilang, S.H., M.Hum. (Penguji II)
5. Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing I)
6. St. Nurjannah, S.H., M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :
Nama : Sri Rahayu
N I M : 10500113092
Jurusan : Ilmu Hukum
Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Munaqasyah, Insha
Allah dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 09.00 - 10.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah
Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Rekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003




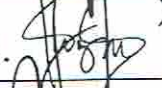


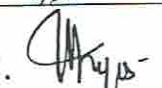


DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Sri Rahayu

NIM : 10500113092

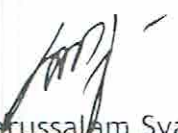
JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Tinjauan Kriminologi terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kec. Btabg Kab. Jeneponto dari Tahun 2013-2016"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1. 
2.	Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Abd. Halim taklli, M.Ag.	Pembimbing	3. 
4.	St. Nurjannah, s.H., M.H.	Pembimbing	4. 
5.	Dr. Jumadi, S.H., M.H.	Penguji	5. 
6.	Dr. Marilang, M.Hum.	Penguji	6. 
7.	Mujahidah, SE	Pelaksana	7. 
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8. 
9.	Sri Rahayu	Pelaksana	8. 

Samata, 02 Juni 2017

Ketua Panitia


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji Penulisan skripsi saudara **Srirahayu**, NIM. **10500113092**, Mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras Di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2013-2016**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Samata, 7 Juni 2017

Penguji I



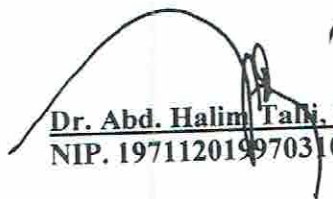
Dr. Jumadi, S.H., M.H.
NIP. 196302204 199403 1 002

Penguji II



Dr. Marilang, SH., M.Hum
NIP. 19621231 199303 1 024

Pembimbing I



Dr. Abd. Halim Tali, S. Ag., M. Ag
NIP. 19711201997031002

Pembimbing II



St. Nurjannah, SH. MH.
NIP. 19760822 200312 2 003



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400
Kampus III : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 768 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Sri Rahayu
N I M : 10500113092
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Akibat Minuman Keras di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2013-2016"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 285 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Jumadi, M.H.
Penguji II : Dr. Marilang, S.H., M.Hum
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 12 Juni 2017

Dekan.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa.



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax 864923
Kampus II : Jl. Il. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 1007 /SLI/PP.00.9/ /2017
Sifat : Penting
Lamp :
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 12 Juni 2017

Kepada,

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqamah, S.H., M.H. (Sekertaris)
3. Dr. Jumadi, S.H., M.H. (Penguji I)
4. Dr. Marilang, S.H., M.Hum. (Penguji II)
5. Dr. H. Abd. Halim Talli, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing I)
6. St. Nurjannah, S.H., M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Sri Rahayu
NIM : 10500113092
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

MAKASSAR

Wassalam



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

RIWAYAT HIDUP



SRI RAHAYU, Dilahirkan di Palu pada hari selasa tanggal 12 April 1994. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Raja Dg Rola dan Ernawari Dg Puji. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 111 Samataring di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada tahun 2007. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kelara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dan tamat pada tahun 2010 Kemudian melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto pada tahun 2010. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Fakultas Syariah dan Hukum, pada Program Studi Ilmu Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R